

The Effect Of Village Fund Financial Supervision And Accountability Of Village Fund Management On Village Government Performance: The Effectiveness Of Village Fund Management As A Mediation Variable (Empirical Study On Gale-Gale Administrative Country, Central Maluku Regency)

Pengaruh Pengawasan Keuangan Dana Desa Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa : Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variable Mediasi (Studi Empiris Pada Negeri Administratif Gale-Gale Kabupaten Maluku Tengah)

La Baiena^{1*}, Dwi Hariyanti², Paul Usmany³

Pascasarjana Universitas Pattimura, Indonesia

bai.wiros@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of village fund financial supervision and accountability of village fund management on village government performance mediated by the effectiveness of village fund management. The sample used in this study was 98 respondents. The analysis tool used is Partial Least Square (PLS). The results showed that financial supervision of village funds had no effect on the performance of village governments. Accountability of village fund management affects the performance of village government. The effectiveness of village fund management affects the performance of village government. Financial supervision of village funds affects the effectiveness of village fund management. Accountability of village fund management affects the effectiveness of village fund management. Furthermore, the results of the investigation also show that financial supervision of village funds affects the performance of village governments mediated by the effectiveness of village fund management and accountability of village fund management affects the performance of village governments mediated by the effectiveness of village fund management.

Keywords : *financial supervision of village funds, accountability of village fund management and effectiveness of village fund management, village government performance.*

1. Pendahuluan

Perkembangan dunia industri dan teknologi yang pesat menuntut adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di desa. Dana desa menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pengelolaan dana desa yang tidak efektif dan efisien dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Pengelolaan dana desa yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa, seperti peningkatan akses terhadap infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, masih terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan memahami bagaimana pengelolaan dana desa dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana

desa, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan kebijakan pengelolaan dana desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini akan fokus pada pentingnya pengelolaan dana desa sebagai faktor utama yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pembangunan di daerah pedesaan.

Namun, pengelolaan dana desa tidak selalu berjalan optimal, dan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa dapat menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program pembangunan. Penelitian dapat mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat memengaruhi efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kemampuan administratif dan manajerial pemerintah desa dalam mengelola dana desa dapat menjadi faktor penentu. Penelitian dapat memfokuskan pada aspek-aspek seperti keterampilan pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan pemantauan proyek-proyek yang didanai oleh dana desa.

Pengelolaan dana desa yang mampu mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dapat memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian dapat mengeksplorasi sejauh mana pengelolaan dana desa dapat memberikan stimulus bagi perkembangan usaha lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Penelitian terkait kinerja pemerintah desa sudah banyak diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Purti, 2020) tentang Transparansi Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Paomacang). Selanjutnya (Khairi & Meiranto, 2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Kemudian (Atiningsih & Ningtyas, 2019) tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). Penelitian (Novya Nurul Istiqomah, 2017) tentang Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Ngawi (Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi). (Hidayah & Wijayanti, 2017) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Serta (Kholmi, 2017) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang).

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka peneliti mencoba menggabungkan 3 variabel dalam sebuah pemodelan yaitu Pengawasan Keuangan Dana Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa yang memengaruhi Kinerja Pemerintah Desa. Yang mana dari beberapa penelitian diatas belum ditemukan.

Pengawasan keuangan dana desa, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan efektivitas pengelolaan dana desa saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Pengelolaan keuangan desa yang baik, partisipasi masyarakat yang tinggi, pengawasan dana desa yang efektif, dan transparansi yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

2. Tinjauan Pustaka

Kinerja Pemerintah Desa

Prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang disebut kinerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai saat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya (Hartono & Rahadi, 2021). Pekerjaan yang dilakukan dengan baik berkorelasi kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan

pelanggan, dan kontribusi ekonomi. Oleh karena itu, kinerja mencakup melakukan pekerjaan dan mencapai hasil dari pekerjaan tersebut. Namun, maknanya lebih luas dan mencakup proses pekerjaan itu sendiri, bukan hanya hasilnya.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam menyelesaikan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, sasaran, atau kriteria yang telah disepakati bersama sebelumnya (Iqbal, 2022). Standar kerja ini dirancang dengan mempertimbangkan standar kerja perusahaan dan disepakati oleh karyawan sebagai dasar untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja (tentang peralatan), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kinerja karyawan secara pribadi dan organisasi adalah dua aspek utama dari konsep kinerja. Kinerja karyawan ditentukan oleh kinerja individu dalam suatu organisasi. Sementara kinerja pegawai dan organisasi sangat terkait, kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai organisasi. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi harus digerakkan atau dijalankan oleh karyawan yang berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja optimal organisasi tidak dapat dicapai tanpa peran pemimpin organisasi dalam memotivasi bawahannya untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang efisien dan efektif (Budiyanto & Mochklas, 2020).

Otonomi daerah dan pemerintahan desa adalah satu dan sama. Pemerintah desa berfungsi sebagai lembaga terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan merupakan dasar untuk keberhasilan program (Simbolon et al., 2021). Kinerja organisasi pemerintah adalah gambaran tentang pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi. Kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan (Erlianti & Fajrin, 2021).

Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan sumber pendanaan yang penting bagi desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa, seperti peningkatan akses terhadap infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, masih terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Arina et al., 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikembangkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Secara tertib uang desa dikelola sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam peraturan yang sudah ditentukan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat dan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 5 tentang dana desa yang dialokasikan untuk desa oleh pemerintah. Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan jumlah desa dan penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis di setiap kabupaten/kota.

Pengelolaan Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan publik mencakup konsep dan prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan pengelolaan dana dan sumber daya keuangan dalam sektor publik. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, teori ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pemerintah desa dapat mengoptimalkan penggunaan

Dana Desa untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fajaruddin, 2021).

Transparansi melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan publik, termasuk Dana Desa. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan dana tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dapat membangun kepercayaan masyarakat, mengurangi potensi penyalahgunaan dana, dan memastikan efisiensi dalam alokasi sumber daya (Budiarto et al., 2020).

Efisiensi melibatkan penggunaan sumber daya keuangan dengan cara yang paling efektif dan hemat biaya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa yang efisien melibatkan perencanaan anggaran yang baik, alokasi dana yang tepat, dan pemantauan proyek secara cermat, sehingga menciptakan hasil yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa (Pasaribu et al., 2023).

Pengelolaan risiko keuangan mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang terkait dengan penggunaan dana publik. Risiko keuangan dapat muncul dari ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan, atau faktor lainnya. Pemerintah desa perlu mengembangkan strategi untuk mengelola risiko ini agar tidak menghambat pencapaian tujuan pembangunan (Muslih, 2020).

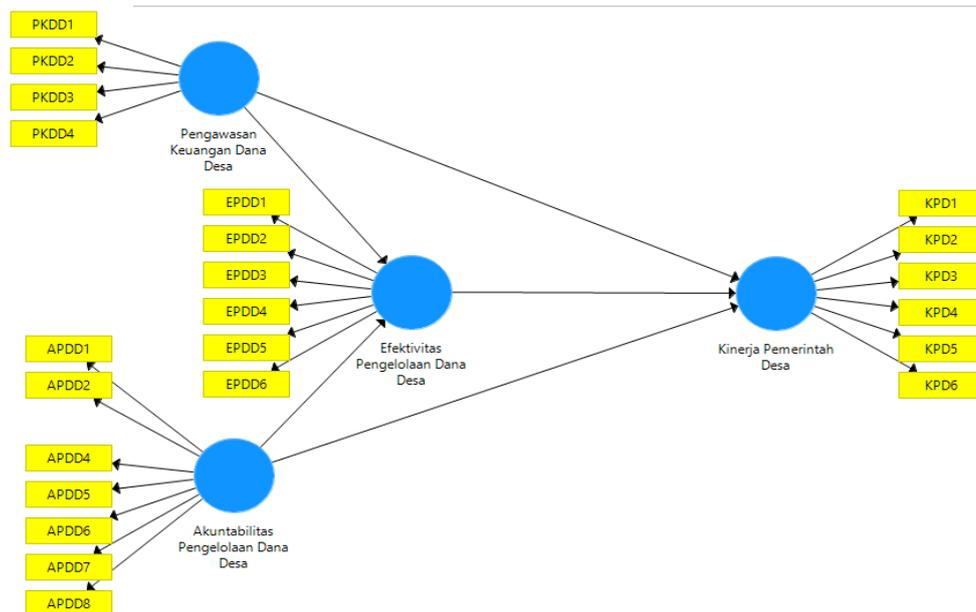
Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan dana publik. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tercermin dalam kebijakan anggaran, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan Dana Desa (Mamuaja et al., 2021).

Penyusunan anggaran melibatkan proses merencanakan dan menetapkan alokasi dana untuk kegiatan tertentu. Perencanaan keuangan melibatkan penentuan sumber dan penggunaan dana. Proses penyusunan anggaran yang baik dapat memberikan landasan yang kokoh untuk pengelolaan Dana Desa. Perencanaan keuangan yang tepat memastikan keberlanjutan dan kelangsungan proyek pembangunan.

Pemantauan melibatkan pengawasan dan pengukuran terus-menerus terhadap pelaksanaan program dan proyek. Evaluasi kinerja melibatkan penilaian dampak dan efektivitas program.

Pemantauan dan evaluasi kinerja membantu pemerintah desa untuk menilai apakah Dana Desa telah digunakan sesuai dengan tujuan, serta memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pembelajaran (Kalam, 2023).

Pengelolaan keuangan publik memberikan landasan konseptual yang kuat untuk merancang kebijakan dan praktik pengelolaan Dana Desa yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan dampak positif penggunaan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Amorodito et al., 2022).



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti pada sebuah objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Obyek alamiah merupakan objek yang apa adanya atau sesuai dengan kenyataan dilapangan, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti berada di objek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di kecamatan seram utara barat (studi pada Negeri Administratif Gale-Gale). Penelitian ini menggunakan teknik jenuh atau sensus yang dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai seluruh sampel masyarakat yang ada di kecamatan seram utara barat (studi pada Negeri Administratif Gale-Gale). Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relative kecil, sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Anggraini & Hidayat, 2021)

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Partial *Least Square* (PLS). Partial *Least Square* (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Herman O. A. Wold dalam bidang ekonometrik pada tahun 1960-an dalam (Martadisastra, 2017). PLS merupakan model analisis yang *powerful* karena dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval dan rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. PLS dapat juga dikatakan sebagai metode pendekatan PLS untuk pemodelan persamaan struktural. Dalam komunitas PLS, istilah "*Path Modeling*" lebih disukai dari pada *Structural Equation Modeling*. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam literatur PLS.

4. Hasil dan Pembahasan

Measurement Model (Outer Model)

Convergent Validity

Berikut ini adalah pengoahan data pertama berdasarkan 4 konstruk:

Tabel 1. *Convergent Validity* Tahap 1

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Kinerja Pemerintah Desa	Pengawasan Keuangan Dana Desa
APDD1	0,8827			
APDD2	0,7869			
APDD3	0,6717			
APDD4	0,8893			
APDD5	0,7702			
APDD6	0,8378			
APDD7	0,8773			
APDD8	0,8245			
EPDD1		0,8876		
EPDD2		0,9341		
EPDD3		0,9109		
EPDD4		0,8619		
EPDD5		0,9151		
EPDD6		0,8916		
KPD1			0,9100	
KPD2			0,9404	
KPD3			0,9415	
KPD4			0,8810	
KPD5			0,9138	
KPD6			0,8713	
PKDD1				0,8871
PKDD2				0,8386
PKDD3				0,7133
PKDD4				0,8833

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Convergent validity dari model pengukuran dapat dari korelasi antara skor item/instrumen dengan skor konstraknya (*loading factor*) dengan kriteria nilai *loading factor* dari setiap instrument >0.70. Berdasarkan pengolahan data pertama dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa terdapat 1 instrumen yang tidak valid (<0.70) yaitu APDD3 sisanya 5 instrumen dinyatakan sudah valid (>0.70). Variabel efektivitas pengelolaan dana desa semua instrumentnya dinyatakan sudah valid (>0.70). Variabel kinerja pemerintah desa semua instrumennya dinyatakan sudah valid (>0.70). Serta, variabel pengawasan keuangan dana desa semua instrumen dinyatakan sudah valid (<0.70). Sehingga nilai *loading factor* yang <0.70 harus dieliminasi atau dihapus dari model.

Discriminant Validity

Penilaian *discriminant validity* telah menjadi prasyarat yang diterima secara umum untuk menganalisis hubungan antar variabel laten. Untuk pemodelan persamaan struktural berbasis varian, seperti kuadrat terkecil parsial, kriteria Fornell-Larcker dan pemeriksaan *cross-loading* adalah pendekatan yang dominan untuk mengevaluasi validitas diskriminan. *Discriminant validity* adalah tingkat diferensi suatu indikator dalam mengukur konstruk instrumen. Untuk menguji *discriminant validity* dapat dilakukan dengan pemeriksaan *Cross Loading* yaitu koefisien korelasi indikator terhadap konstruk asosasinya (*cross loading*) dibandingkan dengan koefisien korelasi dengan konstruk lain (*cross loading*). Nilai konstruk korelasi indikator harus lebih besar

terhadap konstruk asosiasinya daripada konstruk lain. Nilai yang lebih besar tersebut mengindikasikan kecocokan suatu indikator untuk menjelaskan konstruk asosiasinya dibandingkan menjelaskan konstruk-konstruk yang lain.

Tabel 2. *Discriminant Validity*

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Kinerja Pemerintah Desa	Pengawasan Keuangan Dana Desa
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,8441			
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	0,7290	0,9005		
Kinerja Pemerintah Desa	0,7849	0,8387	0,9100	
Pengawasan Keuangan Dana Desa	0,7122	0,7141	0,7233	0,8336

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap konstruknya lebih besar daripada nilai *cross loading*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki *discriminant validity* yang baik, dimana pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik daripada indikator blok lainnya.

Composite Reliability

Setelah menguji validitas konstruk, pengujian selanjutnya adalah uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan *Composite Reliability* (CR) dari blok indikator yang mengukur konstruk CR digunakan untuk menampilkan reliabilitas yang baik. Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* >0.70. Menurut (Sarstedt et al., 2021) koefisien *composite reliability* harus lebih besar dari 0.70 digunakan untuk penelitian konfirmatori sedangkan 0,60 digunakan untuk penelitian eksploratori. Namun, uji konsistensi internal tidak mutlak untuk dilakukan jika validitas konstruk telah terpenuhi, karena konstruk yang valid adalah yang reliabel, sebaliknya konstruk yang reliabel belum tentu valid.

Tabel 3. *Composite Reliability*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,9320	0,9339	0,9453
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	0,9532	0,9550	0,9626
Kinerja Pemerintah Desa	0,9583	0,9619	0,9665
Pengawasan Keuangan Dana Desa	0,8511	0,8682	0,9004

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil pengujian *composite reliability* menunjukkan nilai > 0.70 yang berarti semua variabel dinyatakan reliabel.

Analisis Inner Model

Setelah melakukan evaluasi model dan diperoleh bahwa setiap konstruk telah memenuhi syarat Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Composite Reliability, maka yang berikutnya adalah evaluasi model struktural yang meliputi pengujian kecocokan model

(model fit), dan R2. Pengujian kecocokan model (model fit) digunakan untuk mengetahui apakah suatu model memiliki kecocokan dengan data.

Tabel 4. Model Fit

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,0564	0,0564
d_ULS	0,8775	0,8775
d_G	0,9851	0,9851
Chi-Square	464,3607	464,3607
NFI	0,8229	0,8229

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Nilai NFI mulai 0 – 1 diturunkan dari perbandingan antara model yang dihipotesiskan dengan suatu model independen tertentu. Model mempunyai kecocokan tinggi jika nilai mendekati 1. Berdasarkan tabel diatas nilai NFI berada pada 0.754 yang berarti memiliki kecocokan model yang dapat dinyatakan baik (Ghozali, 2018).

R Square

Inner model (inner relation, structural model, dan substantive theory) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model structural di evaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen. Nilai R² dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel endogen tertentu dan variabel eksogen apakah mempunyai pengaruh substantive (Ghozali, 2018). Hasil R² sebesar 0,6085, dan 0,7746 mengindikasikan bahwa model “baik”, “moderat”, dan “moderat” (Ghozali, 2014).

Tabel 5. R Square

	R Square	R Square Adjusted
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	0,6085	0,6002
Kinerja Pemerintah Desa	0,7746	0,7675

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai *R Square* sebesar 0.6085, hal ini berarti 60,85% variasi atau perubahan efektivitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh pengawasan keuangan dana desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan sisanya sebanyak 39,15% dijelaskan oleh sebab lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa *R Square* pada variabel efektivitas pengelolaan dana desa adalah moderat.

Selanjutnya nilai *R Square* sebesar 0,7746, hal ini berarti 77,46% variasi atau perubahan kinerja pemerintah desa dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan dana desa, pengawasan keuangan dana desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan sisanya sebanyak 22,54% dijelaskan oleh sebab lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa *R Square* pada variabel kinerja pemerintah desa adalah moderat.

Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung
Hipotesis 1

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengawasan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan tabel 4.10. dengan nilai P-Value sebesar 0,1112 > 0,05 atau dengan t-statistik sebesar 1,5956 < 1,67 maka **Hipotesis 1 ditolak** yang berarti bahwa pengawasan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis 1

	Value	T-Statistics	P-Value
Pengawasan Keuangan Dana Desa -> Kinerja Pemerintah Desa	0,1297	1,5956	0,1112

Sumber: Output SmartPls 3.2.9.

Hipotesis 2

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan tabel 4.11. dengan nilai P-Value sebesar $0,0043 < 0,05$ atau dengan t-statistik sebesar $2,8690 > 1,67$ maka **Hipotesis 2 diterima** yang berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis 2

	Value	T-Statistics	P-Value
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -> Kinerja Pemerintah Desa	0,3172	2,8690	0,0043

Sumber: *Output SmartPls 3.2.9.*

Hipotesis 3

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan tabel 4.12. dengan nilai P-Value sebesar $0,0001 < 0,05$ atau dengan t-statistik sebesar $3,9551 > 1,67$ maka **Hipotesis 3 dapat diterima** yang berarti bahwa efektivitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis 3

	Value	T Statistics	P Value
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa -> Kinerja Pemerintah Desa	0,5149	3,9551	0,0001

Sumber: *Output SmartPls 3.2.9.*

Hipotesis 4

Hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengawasan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan tabel 4.13. dengan nilai P-Value sebesar $0,0042 < 0,05$ atau dengan t-statistik sebesar $2,8759 > 1,67$ maka **Hipotesis 4 dapat diterima** yang berarti bahwa pengawasan keuangan dana desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis 4

	Value	T-Statistics	P-Value
Pengawasan Keuangan Dana Desa -> Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	0,3955	2,8759	0,0042

Sumber: *Output SmartPls 3.2.9.*

Hipotesis 5

Hipotesis kelima menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan tabel 4.14. dengan nilai P-Value sebesar $0,0008 < 0,05$ atau dengan t-statistik sebesar $3,3822 > 1,67$ maka **Hipotesis 5 dapat diterima** yang berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis 5

	Value	T Statistics	P Value
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -> Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	0,4473	3,3822	0,0008

Sumber: *Output SmartPls 3.2.9.*

Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung
Hipotesis 6

Hipotesis keenam menunjukkan bahwa pengawasan keuangan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa yang dimediasi oleh efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan tabel 4.16. dengan nilai P-Value sebesar $0,0232 < 0.05$ atau dengan t-statistik sebesar $2,2775 > 1.67$ maka **Hipotesis 6 dapat diterima** yang berarti bahwa pengawasan keuangan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa yang dimediasi oleh efektivitas pengelolaan dana desa.

Karena pengaruh langsung berpengaruh tidak signifikan serta pengaruh tidak langsung juga berpengaruh signifikan, maka variabel mediasi efektivitas pengelolaan dana desa bersifat *Fully Mediated*.

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis 6

	Value	T Statistics	P Value
Pengawasan Keuangan Dana Desa -> Efektivitas Pengelolaan Dana Desa -> Kinerja Pemerintah Desa	0,2037	2,2775	0,0232

Sumber: *Output SmartPls 3.2.9.*

Hipotesis 7

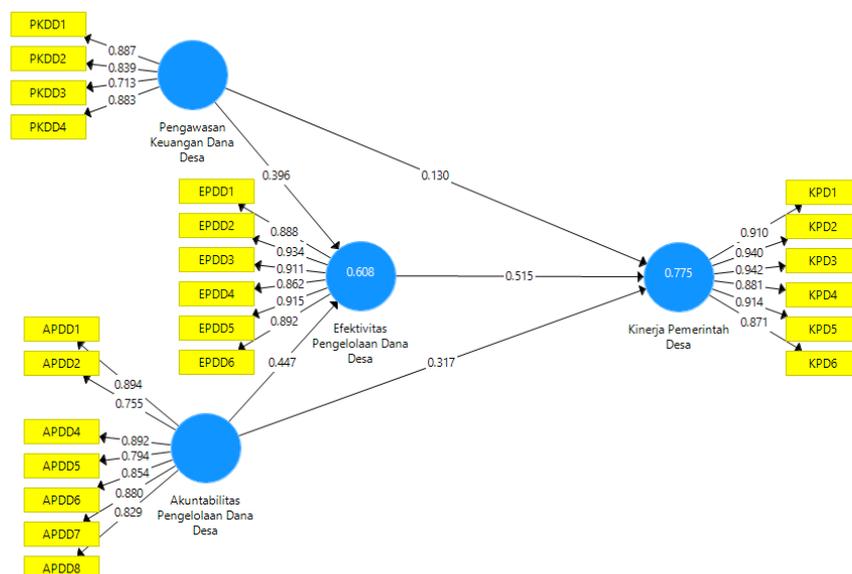
Hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa yang dimediasi oleh efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan tabel 4.17. dengan nilai P-Value sebesar $0,0102 < 0.05$ atau dengan t-statistik sebesar $2,5802 > 1.67$ maka **Hipotesis 7 dapat diterima** yang berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa yang dimediasi oleh efektivitas pengelolaan dana desa.

Karena pengaruh langsung berpengaruh signifikan dan pengaruh tidak langsung berpengaruh signifikan, maka variabel mediasi efektivitas pengelolaan dana desa bersifat *Partial Mediated*.

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis 7

	Value	T Statistics	P Value
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -> Efektivitas Pengelolaan Dana Desa -> Kinerja Pemerintah Desa	0,2303	2,5802	0,0102

Sumber: *Output SmartPls 3.2.9.*



Gambar 2. Full Model

Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Keuangan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Pengawasan keuangan dilakukan oleh dua jenis: internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit internal organisasi, seperti internal auditor, yang memantau dan mengevaluasi kegiatan keuangan secara langsung. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar organisasi, seperti auditor independen, yang memantau dan mengevaluasi kegiatan keuangan dengan cara yang lebih independen dan objektif. Kedua jenis pengawasan ini saling melengkapi dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan efektif.

Pengawas keuangan secara aktif mengawasi pengelolaan keuangan dengan cara melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur. Mereka memantau dan mengevaluasi kegiatan keuangan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam beberapa kasus, pengawas keuangan juga dapat melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kegiatan keuangan yang tidak sesuai dengan standar atau kebijakan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan dengan baik dapat mengurangi tingkat resiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, resiko keuangan seperti korupsi, penyelewengan, dan pengelolaan yang tidak efektif dapat dikurangi.

Pimpinan harus mengawasi secara langsung kinerja pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Pimpinan harus memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan secara teratur untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pimpinan dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah desa dan masyarakat yang dipimpin

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Kejujuran dan keterbukaan informasi adalah dua elemen penting dalam komunikasi yang membentuk fondasi kepercayaan. Kejujuran menciptakan lingkungan di mana setiap pihak merasa nyaman untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan ide-ide mereka tanpa takut dihakimi. Keterbukaan menciptakan lingkungan di mana setiap pihak merasa nyaman untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan ide-ide mereka tanpa takut dihakimi. Kejujuran dan keterbukaan informasi sangat penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat di organisasi, termasuk pemerintah desa.

Kepatuhan dalam pelaporan adalah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan sesuai dengan kenyataan. Kepatuhan dalam pelaporan memungkinkan pemerintah desa untuk memantau dan mengawasi kinerja mereka dengan lebih baik. Kepatuhan dalam pelaporan juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.

Kesesuaian prosedur adalah penting untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan adalah sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan. Kesesuaian prosedur memungkinkan pemerintah desa untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan adalah efektif dan efisien. Kesesuaian prosedur juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.

Kecukupan informasi adalah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Kecukupan informasi memungkinkan pemerintah desa untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah

lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Kecukupan informasi juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.

Ketepatan penyampaian laporan adalah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah tepat dan sesuai dengan kenyataan. Ketepatan penyampaian laporan memungkinkan pemerintah desa untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah tepat dan sesuai dengan kenyataan. Ketepatan penyampaian laporan juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pelayanan pemerintahan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan pendidikan, pengelolaan kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah desa harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan potensi desa. Pembangunan dan kemasyarakatan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah desa harus mampu mengembangkan potensi desa dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Pemerintah desa harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan yang sesuai dengan potensi desa. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti analisis potensi desa, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan pengembangan strategi pembangunan. Pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, dan lain-lain. Pengendalian meliputi berbagai kegiatan, seperti pengawasan, pengawasan, dan evaluasi.

Pemerintah desa harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan yang sesuai dengan potensi desa. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti analisis potensi desa, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan pengembangan strategi pembangunan. Pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, dan lain-lain. Pengendalian meliputi berbagai kegiatan, seperti pengawasan, pengawasan, dan evaluasi.

Pemerintah desa harus mampu menerapkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Pemerataan pendapatan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain-lain. Kesempatan bekerja meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain-lain. Kesempatan berusaha meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain-lain.

Peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Swadaya gotong royong meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain-lain. Peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah desa, sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di dalam organisasi, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal/Inspektorat di setiap kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Pengawasan internal bertujuan untuk memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan

sebelum terjadi penyimpangan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor dari luar organisasi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang melakukan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E UUD 1945. Pengawasan eksternal memberikan penilaian akhir atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh auditi.

Pengawas keuangan secara aktif mengawasi pengelolaan keuangan. Pengawas keuangan memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan sebelum terjadi penyimpangan. Mereka juga melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan dengan baik akan mengurangi tingkat resiko. Pengawasan yang dilakukan dengan baik memungkinkan pengelolaan keuangan untuk dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pengawasan yang dilakukan dengan baik juga memungkinkan pengelolaan keuangan untuk dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Pimpinan harus mengawasi secara langsung kinerja pengelolaan keuangan. Pimpinan harus memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan sebelum terjadi penyimpangan. Mereka juga harus melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Melaksanakan pelayanan pemerintahan adalah salah satu tanggung jawab pemerintah desa. Pelayanan pemerintahan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan pendidikan, pengelolaan kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah desa harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Melaksanakan pembangunan dan kemasayarakatan sesuai kewenangannya adalah salah satu tanggung jawab pemerintah desa. Pembangunan dan kemasayarakatan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah desa harus mampu mengembangkan potensi desa dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti analisis potensi desa, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan pengembangan strategi pembangunan. Pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, dan lain-lain. Pengendalian meliputi berbagai kegiatan, seperti pengawasan, pengawasan, dan evaluasi.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti analisis potensi desa, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan pengembangan strategi pembangunan. Pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, dan lain-lain. Pengendalian meliputi berbagai kegiatan, seperti pengawasan, pengawasan, dan evaluasi.

Pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerataan pendapatan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain-lain. Kesempatan bekerja meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain-lain. Kesempatan berusaha meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain-lain.

Peningkatan swadya gotong royong masyarakat desa berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan dana desa. Swadya gotong royong meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain-lain. Peningkatan swadya gotong royong masyarakat desa dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Yang Dimediasi Oleh Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di dalam organisasi, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal/Inspektorat di setiap kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Pengawasan internal bertujuan untuk memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan sebelum terjadi penyimpangan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor dari luar organisasi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang melakukan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E UUD 1945. Pengawasan eksternal memberikan penilaian akhir atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh auditi.

Pengawas keuangan secara aktif mengawasi pengelolaan keuangan. Pengawas keuangan memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan sebelum terjadi penyimpangan. Mereka juga melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang dilakukan dengan baik akan mengurangi tingkat resiko. Pengawasan yang dilakukan dengan baik memungkinkan pengelolaan keuangan untuk dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pengawasan yang dilakukan dengan baik juga memungkinkan pengelolaan keuangan untuk dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Pimpinan harus mengawasi secara langsung kinerja pengelolaan keuangan. Pimpinan harus memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan sebelum terjadi penyimpangan. Mereka juga harus melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Yang Dimediasi Oleh Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Kejujuran dan keterbukaan informasi adalah dua elemen penting dalam komunikasi yang membentuk fondasi kepercayaan. Kejujuran menciptakan lingkungan di mana setiap pihak merasa nyaman untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan ide-ide mereka tanpa takut dihakimi. Keterbukaan menciptakan lingkungan di mana kejujuran dapat berkembang, dan kejujuran memperkuat keterbukaan. Dalam organisasi, keterbukaan komunikasi juga berkontribusi pada kinerja dan kepuasan karyawan.

Kepatuhan dalam pelaporan adalah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan sesuai dengan kenyataan. Kepatuhan dalam pelaporan memungkinkan pemerintah desa untuk memantau dan mengawasi kinerja mereka dengan lebih baik. Kepatuhan dalam pelaporan juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.

Kesesuaian prosedur adalah penting untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan adalah sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan. Kesesuaian prosedur memungkinkan pemerintah desa untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan adalah efektif dan efisien. Kesesuaian prosedur juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.

Kecukupan informasi adalah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Kecukupan informasi memungkinkan pemerintah desa untuk memantau dan mengawasi kinerja mereka dengan lebih baik. Kecukupan informasi juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.

Ketepatan penyampaian laporan adalah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah tepat dan sesuai dengan kenyataan. Ketepatan penyampaian laporan memungkinkan pemerintah desa untuk memantau dan mengawasi kinerja mereka dengan lebih baik. Ketepatan penyampaian laporan juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.

5. Penutup

Berdasarkan rumusan masalah, rumusan hipotesis dan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Pengawasan keuangan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa
- 2). Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa
- 3). Efektivitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa
- 4). Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa
- 5). Pengawasan keuangan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa
- 6). Pengawasan keuangan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang dimediasi oleh efektivitas pengelolaan dana desa. Karena pengaruh langsung tidak signifikan sedangkan pengaruh tidak langsung berpengaruh signifikan, maka variabel mediasi kompetensi SDM bersifat *Fully Mediated*.
- 7). Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa yang dimediasi oleh efektivitas pengelolaan dana desa. Karena pengaruh langsung berpengaruh signifikan dan pengaruh tidak langsung berpengaruh juga signifikan, maka variabel mediasi kompetensi SDM bersifat *Partially Mediated*.

Daftar Pustaka

- Amorodito, R. D., Lestari, P., Maghfiroh, S., & Apriyani, L. (2022). Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Penggunaan Dana Desa dan Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. *Midyear International Conference*, 1(01).
- Anggraini, R., & Hidayat, I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Nilai Tukar Terhadap Nilai Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 10(1).
- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan*

- Akuntansi*, 23(2), 145–159.
- Budiyanto, E., & Mochklas, M. (2020). *Kinerja Karyawan Ditinjau dari Aspek Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja (Pendekatan Riset)*. CV. AA. RIZKY.
- Erlianti, D., & Fajrin, I. N. (2021). Analisis Dimensi Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 68–75.
- Fajaruddin, F. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 662–671.
- Ghozali. (2018). Structural Equation Modeling Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos. In *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. UNDIP.
- Hartono, A., & Rahadi, D. R. (2021). Work from home terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi covid 19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 16–21.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114>
- Iqbal, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Media Bina Ilmiah*, 16(12), 7901–7914.
- Kalam, K. S. (2023). *Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang*. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Khairi, Y. D., & Meiranto, W. (2021). PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol7.no2.143-152>
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 249–258.
- Martadisastira, D. S. (2017). *Kinerja Pemasok Dalam Rantai Pasokan Makanan Kemasan : Suatu Kajian Kasus Di Indonesia*. 12(1).
- Muslih, M. (2020). Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Konseptual. *Jurnal Media Birokrasi*, 73–86.
- Novya Nurul Istiqomah. (2017). *ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN NGAWI (Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi)*.
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA SIBITO. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95–111.
- Purti, R. A. (2020). TRANSPARANSI KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA (Studi Pada Desa Paomacang) Undang-undang daerah desa ,. *Publikasi Ilmiah*.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In *Handbook of market research* (pp. 587–632). Springer.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.